

STRATEGI SOSIALISASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH MENUJU PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024

Wenny Dwi Lutfiana

Prodi Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu sosial dan Politik

Universitas Negeri Surabaya

wenny.19093@mhs.unesa.ac.id

Muhammad Danu Winata, S.Sos., M.A., M.Si(Han).

Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

muhammadwinata@unesa.ac.id

Abstract

From the research results, the researcher found a similarity between the theory they had designed and the field research results, which in this study used a strategic management approach with the concept of Plan, Do, Check, and Act. (PDCA). It has been proven that from the beginning, the Surabaya City General Election Commission designed an election socialization strategy primarily aimed at first-time voters, people with disabilities, and the elderly, but it is more focused on first-time voters or Gen Z. This is because in the 2024 simultaneous elections, the number of first-time voters is expected to reach 639,480, meaning their population is 28.8% higher than that of middle-aged voters. After establishing the planning or socialization strategy, the Surabaya City KPU collaborates with many youth organizations, as well as higher and secondary educational institutions, to foster good communication with the first-time voter community.

Keywords: Strategy, Political Socialization, Voter Participat

Abstrak

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan kesamaan teori yang sudah peneliti rancang dengan hasil penelitian dilapangan yaitu pada penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen strategis dengan konsep *Plan, Do, Check dan Act* (PDCA). Terbukti bahwa sejak awal Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya merancang strategi sosialisasi pemilihan umum terutama ditujukan untuk pemilih pemula, disabilitas, dan usia tua, namun lebih mengarah ditekankan kepada pemilih pemula atau GenZ, karena pada pemilu serentak 2024 ini dpt pemilih pemula mencapai 639.480, artinya populasinnya mencapai 28.8% lebih tinggi daripada pemilih menengah, setelah menetapkan planing atau rancangan strategi sosialisasi yang dilakukan KPU Kota surabaya adalah bekerja sama dengan banyak organisasi

kepemudaan, ataupun lembaga pendidikan tinggi, maupun menengah, agar menjalin komunikasi yang baik terhadap masyarakat pemilih pemula.

Kata Kunci: Strategi, Sosialisasi Politik, Partisipasi pemilih

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara demokrasi. Demokrasi yang saat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi demokrasi mengalami perubahan dan corak yang berbeda. Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut Konstitusi. Dalam konteks Indonesia Konstitusi yang menjadi pegangan adalah UUD 1945, jika kita amati, UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat dua kali, pertama pembukaan alinea keempat “maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat...” Kedua, pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”.

Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat. Menurut KBBI, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu *demos* dan *cratos*. *Demos* berarti rakyat dan *cratos* berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jika digabungkan, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Sedangkan, para ahli juga mengartikan demokrasi dengan pemahaman yang berbeda-beda (Dewi & Al-khansa: 2021, hlm. 2723-2328) (Nurgiansah, 2021). Berikut merupakan pengertian demokrasi menurut para ahli:

1. Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah sebuah sistem pemerintahan yang dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri.
2. Demokrasi menurut Charles Costello adalah suatu sistem sosial dan politik yang mana kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh hukum dan juga budaya yang melindungi segenap hak perorangan dari warga negara itu sendiri.

3. Demokrasi menurut Hans Kelsen adalah suatu pemerintahan yang diadakan dan dilaksanakan dari rakyat dan untuk rakyat, serta mengenai pelaksanaan kekuasaan negaranya adalah wakil dari rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat setelah adanya keyakinan terhadap aturan yang telah ditetapkan berhubungan dengan penerapan dari kekuasaan negara.

Demokrasi telah menjadi bentuk pemerintahan sejak zaman Yunani kuno. Hari Demokrasi Internasional diperingati pada tanggal 15 September setiap tahun. Majelis Umum PBB pertama kali mengamatinnya pada tahun 2007 (Yusuf Gramedia: 2021). Dalam bentuk pemerintahan demokratis, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Sistem pemerintahan yang demokratis memungkinkan rakyatnya untuk berpartisipasi secara setara dalam semua proses pengambilan keputusan dan memiliki kekuatan untuk mengubah lanskap politik suatu negara. Dalam masyarakat demokratis, masyarakat juga dapat dengan bebas terlibat dalam pembuatan, pemajuan, dan penerapan undang-undang baik secara langsung maupun melalui perwakilan mereka. Hal ini dicapai melalui keterlibatan rakyat dalam Partai Demokrat, khususnya dalam pemilihan umum negara bagian yang terbuka untuk umum. Panitia Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang mengawasi pemilu.

Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) ditetapkan jumlah pemilih di Kota

Surabaya sebanyak 2.131.756 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.090.234 pemilih dan perempuan berjumlah 1.090.234 pemilih yang tersebar di 31 kecamatan, 154 kelurahan, dan 8.146 TPS. Adapun rekapitulasi DPTHP-3 tidak mengalami perubahan dari DPTHP-2. Adapun total Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 16. 503 pemilih dengan perincian DPTb H-7 sekitar 2.629 pemilih dan DPTb H-30 sekitar 13. 811 pemilih. Sedangkan untuk DPTb Tahanan 52 pemilih, DPTb Sakit 24 pemilih, DPTb bencana 3 pemilih dan DPTb tugas 2.613 pemilih.

Sosialisasi politik sangat penting dalam proses pemilu, terutama karena kerangka tersebut selalu berubah setiap kali diterapkan. Sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu, KPU diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk melakukan sosialisasi dalam rangka penyelenggaraan dinamika demokrasi. Akibatnya, sosialisasi politik sebelum pemilu masih kurang, sehingga proses demokrasi sulit berjalan. Sehingga sosialisasi politik menjadi penting dalam pemilihan umum agar masyarakat dapat mengetahui kehidupan politik atau mengetahui hak maupun kewajiban sebagai warga negara serta mencapai tujuan negara yang demokratis (Limbong, 2009).

Kota Surabaya yang berpenduduk sekitar 2.893.698 jiwa merupakan kota metropolitan yang sedang berkembang. Kota Surabaya selalu semarak karena letaknya yang strategis sebagai pusat kegiatan perekonomian masyarakat

setempat. Menjadi pusat kegiatan berarti menjadi tempat migrasi dimana orang-orang dari berbagai daerah dan kelompok umur berkumpul. Jumlah penduduk akan bertambah signifikan, begitu pula daya tarik Kota Surabaya yang menjanjikan segala macam fasilitas. Warga Surabaya harus tetap hidup dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Badan Pusat Statistik Kota Surabaya menyajikan rentang usia pada tabel di bawah ini untuk tahun 2019.

Kota Surabaya dengan populasi penduduk terbesar di Jawa Timur adalah sebuah kota dengan partisipasi politik terendah hal ini dapat kita lihat berdasarkan data yang terdapat pada Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jawa Timur. Namun demikian terdapat peningkatan partisipasi politik sebesar 6,91% dari pemilu pada tahun 2014 partisipasi masyarakat sebesar 69,80% mengalami kenaikan pada pemilu 2019 menjadi 76,71%. Oleh karena itu maka akan menjadi suatu bahasan yang menarik mengenai bagaimana strategi yang dibangun oleh KPU Kota Surabaya untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dari tahun ke tahun utamanya pada Pemilu serentak tahun 2024 mendatang. (Viva, Databoks 2019).

Permasalahan terkait rendahnya partisipasi masyarakat Kota Surabaya sebenarnya sangat bertolak belakang dengan potensi masyarakat Indonesia yang ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang besar. Jika kita ingin mewujudkan tujuan mengubah Indonesia menjadi negara demokratis, kita harus

memanfaatkan besarnya jumlah penduduk yang tinggal di kota Surabaya, yang merupakan potensi yang sangat besar.

PARTISIPASI PEMILIH PILPRES KOTA SURABAYA TAHUN 2019		
KECAMATAN	(01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN	(02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO
ASEMROWO	13.553	9.155
BENOWO	26.027	9.307
BUBUTAN	34.861	17.750
BULAK	16.120	7.089
DUKUHPAKIS	26.812	7.133
GAYUNGAN	15.955	8.042
GENTENG	23.453	8.119
GUBENG	55.986	22.738
GUNUNG ANYAR	23.427	9.862
JAMBANGAN	18.443	9.669
KARANGPILANG	27.646	13.254
KENJERAN	52.677	30.910
KREMBANGAN	40.145	19.184
LAKARSANTRI	26.450	7.197
MULYOREJO	38.354	12.023
PABEAN CANTIKAN	22.876	17.008
PAKAL	22.108	9.139
RUNGKUT	45.911	18.775
SAMBIKEREP	28.235	8.490
SAWAHAN	82.460	26.653
SEMAMPIR	46.359	44.907
SIMOKERTO	33.817	15.487
SUKOLILO	43.816	16.901
SUKOMANGGAL	43.873	12.850
TAMBAKSARI	90.907	29.683
TANDES	34.828	15.725
TEGALSARI	39.986	12.939
TENGGILIS MEJOYO	25.159	8.230
WIYUNG	29.989	19.256

WONOCOL O	30.939	13.733
WONOKRO MO	57.239	27.696
JUMLAH	1.118.411	498.904
JUMLAH SUARA SAH	1,617,948	
JUMLAH DPT	2.218.586	
JUMLAH GOLPUT	600.638	

Table 1.1 Data Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2019

Pada tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya menetapkan data hasil partisipasi pemilu Presiden dengan jumlah DPT 2.218.568, dengan jumlah suara sah 1.614.948 yaitu sekitar 79% pemilih dengan sisa 21% yang Golput atau 416.941 pemilih Golput. Hal ini menunjukkan tingkat sosialisai oleh KPU Surabaya kurang maksimal, sebab data menunjukkan masih 416.941 yang tidak memilih. Pada pemilu serentak 2024 mendatang penulis bertujuan baswasanya kota Surabaya merupakan lokasi yang sangat menarik untuk diteliti dikarenakan pertama, Kota Surabaya merupakan kota dengan penduduk terpadat dibandingkan dengan Kabupaten ataupun Kota lain yang berada di Provinsi Jawa Timur.

Penulis tertarik untuk menulis makalah dengan judul “Strategi Sosialisasi Politik KPU Kota Surabaya dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024” karena dua permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan rangkuman mengenai program

sosialisasi yang dilaksanakan KPU Kota Surabaya dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu Capres dan Wapres yang dijadwalkan pada tahun 2024. Lebih lanjut, artikel ini dimaksudkan sebagai bahan penilaian. bagi KPU Kota Surabaya dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

METODE

Teknik rencana pengelolaan Plan-Do-Check-Act (PDCA) digunakan dalam penelitian ini, yang merupakan penelitian kualitatif deskriptif untuk meningkatkan partisipasi politik pada tahun 2024 dalam rencana Kebijakan KPU Kota Surabaya.

Salah satu jenis strategi penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti adalah pencarian data yang tepat atau komprehensif dari studi kasus terkait. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi kontak interpersonal guna memperoleh pemahaman obyektif terhadap fenomena sosial. Akibatnya, fokus penelitian kualitatif adalah pada fenomena yang menyelidiki jaringan sosial dan perilaku patuh.

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya yang bertempat di Jl. Adityawarman No. 87, Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya. Subyek yang diperiksa meliputi orang, benda, dan kejadian tertentu. Subyek penelitian merupakan tempat menyimpan informasi. Temuan

penelitian ini, termasuk unit analisisnya, dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. Salah satu subproyek yang diteliti adalah Komisi KPU Surabaya, khususnya bidang pelayanan sosial, pendidikan, dan partisipasi masyarakat (Sosdikliparmas).

objek penelitian adalah jenis subjek penelitian tertentu yang menjadi fokus dan ingin dicapai peneliti. Masalah mana yang memerlukan pemecahan atau dapat diselesaikan melalui penelitian? Tujuan dari penelitian ini adalah menggunakan strategi sosial politik KPU Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2024.

Dalam penyelidikan ini digunakan metode yang disebut purposive sampling untuk mengetahui siapa saja informannya. Untuk memperoleh data yang mewakili populasi, peneliti menggunakan purposive sampling untuk mengidentifikasi informan berdasarkan pertimbangan dan kriteria yang dimodifikasi (Sugiyono, 2014). Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik pengambilan data meliputi observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Menuju Pemilu Serentak 2024.

KPU Surabaya merupakan satu-satunya organisasi yang membidangi proyek-proyek pemilu, oleh karena itu KPU mempunyai wewenang untuk memastikan bahwa setiap proyek memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan keterlibatan, khususnya dalam inisiatif-inisiatif terkait Surabaya. disebutkan dalam Pasal 1 Angka 13 KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelibatan Massa dan Kesejahteraan Masyarakat pada Pemilu Serentak 2024, minimal harus ada satu orang peserta partisipasi masyarakat, khususnya dalam hal ini Kota Surabaya, untuk setiap Umum. Menurut Nadir (2005: 16), salah satu prinsip utama pengadaan pemerintah yang dipimpin warga negara dalam negara demokrasi adalah proses pengadaan dilakukan oleh badan independen dalam pemerintahan, serupa dengan KPU.

a. Mengidentifikasi Pemilih

Mengidentifikasi pemilih adalah teknik yang melibatkan pengelompokan individu berdasarkan kriteria yang sama; Dalam kasus ini, KPU Kota Surabaya mengidentifikasi pemilih pada Pilkada Serentak yang berlangsung pada tahun 2024.

Menurut pak subairi :

“Langkah pertama dalam menentukan strategi yang akan ditempuh adalah dengan mengidentifikasi atau mempelajari siapa pemilihnya, apakah itu agama, kebudayaan, pemuda, atau yang lainnya. Karena kecil kemungkinannya penduduk Surabaya

Barat yang memiliki tingkat kebersamaan yang tinggi, hanya dapat disosialisasikan dengan cara konvensional; harus ada sesuatu yang dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam sosialisasi."

Senada dengan yang dikatakan oleh pak subairi, pak nur syamsi juga mengatakan bahwa

" Merencanakan suatu rencana memerlukan pertimbangan yang cermat mengenai populasi mana yang akan ditargetkan dan bagaimana melakukannya. Jika hal ini dilakukan, maka masyarakat akan menerima pendekatan kami dan bersemangat untuk berpartisipasi serta mendengar proses sosialisasi pemilu serentak tahun 2024" .

b. Menentukan Sasaran

KPU Kota Surabaya lebih menekankan pada sebelas basis pemilih sebagai tujuan yang akan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan prtisipasi pemilih pada pemilu serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Keluarga
- 2) Pemula
- 3) Muda
- 4) Perempuan
- 5) Penyandang disabilitas
- 6) Berkebutuhan khusus
- 7) Kaum marjinal
- 8) Komunitas
- 9) Keagamaan
- 10) Komunitas demokrasi
- 11) Warga internet

c. Menetapkan Strategi

Pak Subairi mengatakan :

"Selain pengorganisasian KPU Kota Surabaya, PPK, dan TPS, tujuan diadakannya pemilu adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Selain itu, KPU Surabaya membentuk Relawan Demokrasi yang akan mendukung KPU Kota Surabaya dalam berorganisasi dan berinteraksi dengan warga Surabaya menjelang pemilu 2024." menurut pernyataan yang dibuat oleh Pak Subairi. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Nur Syamsi:

"Konsolidasi tersebut dilakukan dalam rangka mendukung KPU Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pemilu serentak, termasuk cara dan waktu pencoblosan. Oleh karena itu, kemitraan ini sangat penting bagi upaya KPU Kota Surabaya dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat."

Ringkasnya, KPU Kota Surabaya membentuk Relawan Demokrasi untuk membantu sosialisasi dan sosialisasi pemilu serentak yang dijadwalkan pada tahun 2024

Pelaksanaan Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Menuju Pemilu Serentak 2024

Setiap kesuksesan pelaksanaan Pemilu di Surabaya salah satunya dapat dipengaruhi oleh faktor strategi sosialisasi politik kepada pemilih yang

dilakukan oleh KPU Kota Surabaya dengan baik dan efektif. KPU Kota Surabaya secara bersinergi melaksanakan sosialisasi politik kepada pemilih dengan maksimal dan menyakinkan masyarakat dengan pesan yang disampaikan agar masyarakat dapat memberikan hak suaranya dalam kontestasi Pemilu Serentak 2024.

Dengan menggunakan berbagai jenis media elektronik, termasuk televisi dan radio, serta platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube, kita dapat memahami pendekatan yang akan digunakan untuk melakukan sosialisasi politik kepada pemilih KPU di Surabaya. Dengan kata lain, pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih lebih banyak dilakukan melalui media sosial dan elektronik dengan menggandeng pelaku seni serta relawan demokrasi. Penggunaan media sosial tersebut bertujuan dapat menarik partisipasi masyarakat terutama pada golongan milenial yang sering menggunakan media sosial untuk berinteraksi melalui media sosial serta melihat isu-isu berita politik. Serta penggunaan media elektronik seperti Televisi dan Radio ditujukan kepada masyarakat Surabaya secara umum.

Selain melalui media sosial dan elektronik, pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih KPU Kota Surabaya turut dilakukan secara langsung atau melalui tatap muka. Pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih secara tatap muka dapat diketahui dengan bentuk kegiatan *Goes To Campus* dan sosialisasi kepada

mahasiswa disabilitas *Airlangga Inklusif Learning* (AIL) dengan menggandeng Relawan Demokrasi. Pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih secara tatap muka turut dibantu oleh PPK/PPS dengan melakukan sosialisasi ke jamaah tahlil, kegiatan kemasyarakatan, mobil keliling diiringi musik patrol dan di beberapa simpangan jalan raya di Surabaya dengan menggunakan badut maskot Pemilu 2024.

Tujuan pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih KPU Kota Surabaya yang dilakukan melalui media sosial, media elektronik dan tatap muka agar masyarakat Surabaya dapat memahami, menghayati, menjunjung tinggi bangsa serta negara sebagai negara yang demokratis. Setidaknya masyarakat Surabaya dapat menggunakan hak suaranya terutama saat pelaksanaan Pemilu serentak 2024.

Meskipun pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya 100% belum tepat sasaran, tetapi dengan kondisi dimana sekarang pemilih pemula atau Gen Z , tingkat partisipasi masyarakat Surabaya meningkat 0,26% dibandingkan dengan Pemilu 2019. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya melalui media sosial, elektronik dan tatap muka telah tercapai dengan baik dan masih perlu dikaji kembali untuk dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat agar masyarakat Surabaya dapat mengetahui hak suaranya dan

ikut partisipatif dalam kegiatan di setiap Pemilu.

Hambatan Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Menuju Pemilu Serentak 2024.

Berdasarkan hasil yang didapatkan peneliti saat dilakukan penelitian, bahwa ada dua faktor penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih KPU Kota Surabaya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang pertama adanya Pemilih pemula yang mana mereka belum mengenal lebih apa itu pemilu yang menyebabkan masyarakat Gen-z ini meremehkan tentang adanya pemilu serta faktor penghambat yang kedua yaitu masyarakat yang apatis pada setiap pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih. Dari dua faktor penghambat tersebut membuat pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih tidak dapat tercapai dengan sempurna.

Pelaksanaan sosialisasi politik melalui teknologi informasi yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya sebenarnya sangat membantu proses sosialisasi tersebut untuk menjangkau ke para pemilih pemula atau para anak muda karena pemilih pemula lebih sering melihat atau menggunakan media sosial tiap harinya, namun melalui teknologi informasi tersebut jangkauannya lebih banyak ke anak muda atau para pemilih pemula saja. Sehingga kurang merata terhadap para pemilih yang sudah berumur atau sekitar umur >45 tahun karena jarang menggunakan media sosial.

Pelaksanaan melalui teknologi informasi juga sangat berpengaruh terhadap konten yang disajikan kepada pemilih. Jika konten yang disajikan kurang menarik maka pengguna media sosial juga tidak mau membaca atau bahkan mengikuti rangkaian acara yang dilakukan melalui media sosial tersebut. Apa lagi jika dilihat dari beberapa bentuk kegiatannya atau konten yang disajikan oleh KPU Kota Surabaya hanya formalitas tanpa melihat sasaran yang ingin dicapai dalam sosialisasi politik tersebut. Sehingga dengan menggunakan teknologi informasi tersebut membuat pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya kurang menjangkau terhadap seluruh lapisan elemen masyarakat Kota Surabaya.

Temuan dan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, maka tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 menurun, dengan didasarkan bahwa total DPT Kota Surabaya Tahun 2019 menurut hasil pleno Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) ditetapkan jumlah pemilih di Kota Surabaya sebanyak 2.132.160 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.090.234 pemilih dan perempuan berjumlah 1.090.234 pemilih yang tersebar di 31 kecamatan,

154 kelurahan, dan 8.146 TPS. Adapun rekapitulasi DPTHP-3 tidak mengalami perubahan dari DPTHP-2. Adapun total Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 16.503 pemilih dengan perincian DPTb H-7 sekitar 2.629 pemilih dan DPTb H-30 sekitar 13.811 pemilih. Sedangkan untuk DPTb Tahanan 52 pemilih, DPTb Sakit 24 pemilih, DPTb bencana 3 pemilih dan DPTb tugas 2.613 pemilih. dengan partisipasi mencapai 82 persen untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan di tahun 2024 pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dari jumlah warga yang mencoblos menghasilkan 1.653.569 suara sah dan 565.017 suara tidak sah dan menghasilkan 76 persen partisipasi dari total DPT 2.218.586.

Hal ini dikarenakan beberapa hambatan yang dialami pada saat sosialisasi KPU Kota Surabaya yang mana hambatan tersebut ialah Berdasarkan hasil yang didapatkan peneliti saat dilakukan penelitian, bahwa ada dua faktor penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih KPU Kota Surabaya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang pertama adanya

Pemilih pemula yang mana mereka belum mengenal lebih apa itu pemilu yang menyebabkan masyarakat Gen-z ini meremehkan tentang adanya pemilu serta faktor penghambat yang kedua yaitu masyarakat yang apatis pada setiap pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih. Dari dua faktor penghambat tersebut membuat pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih tidak dapat tercapai dengan sempurna.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisi data yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwasannya partisipasi masyarakat terhadap pemilu presiden dan wakil presiden Tahun 2024 menurun dari tahun 2019 disini disebabkan bahwa adanya hambatan yang dilakukan KPU Surabaya dalam melakukan Strategi Sosialisasi Politik terhadap masyarakat.

Pelaksanaan sosialisasi politik melalui teknologi informasi yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya sebenarnya sangat membantu proses sosialisasi tersebut untuk menjangkau ke para pemilih pemula atau para anak muda karena pemilih pemula lebih sering melihat atau menggunakan media sosial tiap harinya, namun melalui teknologi informasi tersebut jangkauannya lebih banyak ke anak

muda atau para pemilih pemula saja. Sehingga kurang merata terhadap para pemilih yang sudah berumur atau sekitar umur >45 tahun karena jarang menggunakan media sosial.

Masyarakat yang apatis turut menjadi hambatan pada saat pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih dalam Pemilu Serentak 2024 di Surabaya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Surabaya yang beragam agama, budaya, pendidikan serta kondisi ekonomi sosial yang berbeda yang membuat KPU Kota Surabaya tidak dapat memberikan sosialisasi politik secara menyeluruh kepada masyarakat, sehingga menjadi salah satu faktor masyarakat tersebut bersikap apatis. Salah satu masyarakat apatis di Kecamatan Rungkut beranggapan bahwa jika setiap pelaksanaan Pemilu perlu mendapatkan sesuatu agar datang ke TPS. Sehingga KPU Kota Surabaya perlu tenaga ekstra dalam pelaksanaan sosialisasi politik kepada pemilih pada saat Pemilu serentak 2024 di Surabaya

DAFTAR PUSTAKA

Ariyanti, D., Nawangsih dkk. (2021). "Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luber Jurdil". Jurnal IKRAITH-ABDIMAS

Estivani, (2021). "Trategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Surabaya Dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19". Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Herdiansyah Haris, (2011), "Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu Ilmu Sosial" . Jakarta: Salemba Humanika.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Putri, P. (2016). "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur". Jurnal Ilmu Komunikasi, Universitas Mulawarman.

Setyarahajoe, Ratna. "Strategi Komunikasi Politik Humas Kpu Kota Surabaya Dalam Sosialisasi Pemilih Pada Pemilihan Presiden Tahun 2014 Guna Meminimalisir Golput." Intelektual: Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi 3.1 (2016): 79-83.

Widodo, Hananto. "Dampak Sosialisasi Pemilu Oleh Kpu Kota Surabaya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilgub Jatim Tahun 2013 (Di Kecamatan Gayungan Surabaya)." Kajian Moral dan Kewarganegaraan 2.2 (2014): 372-386.

Hidayat, Rochmat. "Menimbang Strategi Pemilihan Kepala Desa: Strategi Sosialisasi Politik Kepala Desa Terpilih Desa Bojong Kulon Kabupaten Cirebon." SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi 12.01 (2018): 22-30.

